

ABSTRAK

Masalah dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pernyataan masalah (*problem statement*) yaitu Efektivitas pembuatan KTP di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon belum efektif, hal ini diduga berkaitan erat dengan faktor-faktor : komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan SIAK yang tidak optimal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka identifikasi masalah dalam bentuk pertanyaan yaitu (1) Seberapa besar pengaruh komunikasi terhadap efektivitas pembuatan KTP di ? (2) Seberapa besar pengaruh sumber daya terhadap efektivitas pembuatan KTP ? (3) Seberapa besar pengaruh disposisi terhadap efektivitas pembuatan KTP ? (4) Seberapa besar pengaruh struktur birokrasi terhadap efektivitas pembuatan KTP ? (5) Seberapa besar pengaruh komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dalam kebijakan SIAK terhadap efektivitas pembuatan KTP?

Hipotesis penelitian ini yaitu (1) Komunikasi kebijakan berpengaruh besar terhadap efektivitas pembuatan KTP (2) Sumberdaya kebijakan berpengaruh besar terhadap efektivitas pembuatan KTP. (3) Disposisi kebijakan berpengaruh besar terhadap efektivitas pembuatan KTP. (4) Struktur birokrasi kebijakan berpengaruh besar terhadap efektivitas pembuatan KTP. (5) Komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam kebijakan SIAK berpengaruh besar terhadap efektivitas pembuatan KTP.

Pengumpulan data dalam Penelitian ini dengan teknik studi literatur, dan studi lapangan, yaitu untuk mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara dan angket.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan tipe deskriptif, dan sampel yang diambil dari seluruh anggota populasi dengan menggunakan teknik sensus. Metode dianalisis dengan menggunakan analisis statistik seperti ; uji validitas dan reliabilitas, dan analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS versi 16,0 for windows.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pembuatan KTP dipengaruhi oleh (1) faktor komunikasi secara langsung sebesar 10,76 % dan tidak langsung sebesar 7,13 % dan untuk regresi berganda menggunakan koefisien determinasi yang disesuaikan (Adjusted R-Square) pengaruh positif antara faktor komunikasi sebesar 29,7 % terhadap efektivitas pembuatan KTP. (2) faktor sumberdaya secara langsung sebesar 9,06 % dan tidak langsung sebesar 8,74 % dan untuk regresi berganda menggunakan koefisien determinasi yang disesuaikan (Adjusted R-Square) pengaruh positif antara faktor sumberdaya sebesar 35 % terhadap efektivitas pembuatan KTP. (3) faktor disposisi secara langsung sebesar 7,51 % dan tidak langsung sebesar 6,82 % dan untuk regresi berganda menggunakan koefisien determinasi yang disesuaikan (Adjusted R-Square) pengaruh positif antara faktor disposisi sebesar 27,4 % terhadap efektivitas pembuatan KTP. (4) faktor struktur birokrasi secara langsung sebesar 4,57 % dan tidak langsung sebesar 5,41 % dan untuk regresi berganda menggunakan koefisien determinasi yang disesuaikan (Adjusted R-Square) pengaruh positif antara faktor struktur birokrasi sebesar 21,7 % terhadap efektivitas pembuatan KTP. (5) faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi secara langsung sebesar 31,9 % dan tidak langsung sebesar 28,1 % dan untuk regresi berganda menggunakan koefisien determinasi yang disesuaikan (Adjusted R-Square) pengaruh positif antara faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi sebesar 60 % terhadap efektivitas pembuatan KTP.

Berdasarkan temuan dalam penelitian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang mengatakan bahwa faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi berpengaruh besar terhadap efektivitas pembuatan KTP di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, teruji.

ABSTRACT

The problem in this study is formulated in the form of a statement that the issue Effectiveness of making KTP in the District Kesambi Cirebon not effective, it is believed to be related closely to the factors: communication, resources, disposition and bureaucratic structure in which policy implementation is not optimal SIAK.

Based on the above, then the identification problem in the form of questions: (1) How big is the influence of communication on the effectiveness of the KTP? (2) How much influence on the effectiveness of resource KTP? (3) How much influence the disposition of the effectiveness of KTP? (4) How big is the influence of bureaucratic structure on the effectiveness of KTP? (5) How big is the influence of communication, resources, disposition and bureaucratic structure in SIAK of the effectiveness of policy making KTP?

The hypothesis of this study are (1) Communication major effect on the effectiveness of policy making KTP (2) Resources policies greatly affect the effectiveness of the KTP. (3) The disposition policies greatly affect the effectiveness of the KTP. (4) The structure of bureaucratic policy-making influence on the effectiveness of KTP. (5) Communication, resources, disposition, and the structure of the bureaucracy in policy SIAK major effect on the effectiveness of making KTP.

Collecting data in this study with the technique literature, and field studies, is to gather data by observation, interviews and questionnaires.

The research method used in this research is method survey with descriptive TIPA, and samples taken from all members of the population using census techniques. Methods were analyzed using statistical analysis such as validity and reliability, and multiple linear regression analysis with SPSS version 16.0 for windows.

The results showed that the effectiveness of the KTP is affected by (1) factors of communication directly and indirectly 10.76% of 7.13% and for multiple regression using the adjusted coefficient of determination (Adjusted R-Square) between the positive effects of communication factors 29.7% of the effectiveness of making KTP. (2) resource factor of 9.06% directly and indirectly, by 8.74% and for multiple regression using the adjusted coefficient of determination (Adjusted R-Square) between the positive influence of resource factors of 35% of the effectiveness of making KTP. (3) direct the disposition of a factor of 7.51% and 6.82% for indirect and for multiple regression using the adjusted coefficient of determination (Adjusted R-Square) between the positive influence of disposition factors of 27.4% on the effectiveness of making KTP. (4) bureaucratic structure factor of 4.57% directly and indirectly, by 5.41% and for multiple regression using the adjusted coefficient of determination (Adjusted R-Square) between the positive influence of the bureaucratic structure factor of 21.7% on the effectiveness of making KTP. (5) factors of communication, resources, disposition, and the bureaucratic structure of 31.9% directly and indirectly, by 28.1% and for multiple regression using the adjusted coefficient of determination (Adjusted R-Square) between the positive effects of communication factors, resource, disposition, and the structure of the bureaucracy by 60% of the effectiveness of making KTP.

Based on the findings in the study, it can be concluded that the hypothesis that the factors of communication, resources, disposition and bureaucratic structure greatly affect the effectiveness of the KTP in the District Kesambi Cirebon, tested..

PENGARUH FAKTOR KOMUNIKASI, SUMBER-DAYA, DISPOSISI DAN STRUKTUR BIROKRASI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DI KECAMATAN KESAMBI KOTA CIREBON

Oleh :
Suwarta

Pendahuluan

Administrasi kependudukan merupakan salah satu sistem yang diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara, di lain sisi administrasi kependudukan dapat memberikan pemenuhan hak-hak administratif seperti pelayanan publik dan perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan tanpa adanya pembedaan perlakuan kepada masyarakat.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, maka dikembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). SIAK menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mempunyai tujuan untuk :

1. Terlaksananya Administrasi Kependudukan secara nasional.
2. Terlaksananya Administrasi Kependudukan secara komprehensif, permanen, wajib dan berkesinambungan.
3. Memberikan pelayanan yang profesional dalam memenuhi hak penduduk di bidang Administrasi Kependudukan.
4. Menyediakan data dan informasi secara nasional mengenai kependudukan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses, yang dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan pembangunan pada umumnya.

SIAK mulai diterapkan di Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kota Cirebon sejak bulan September 2008, yang berarti hingga saat sekarang ini pelaksanaan SIAK di Kota Cirebon sudah berjalan lebih dari 2 (dua) tahun. Instansi penanggung jawab implementasi kebijakan SIAK di Kota Cirebon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang melibatkan aparat kecamatan dan kelurahan. SIAK dilaksanakan di setiap tingkat wilayah administrasi pemerintahan mulai kelurahan, kecamatan hingga kota.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 “tujuan reformasi administrasi kependudukan akan dapat tercapai apabila dilakukan dengan mengimplementasikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).” SIAK diharapkan dapat menunjang pelayanan administrasi kependudukan, antara lain dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP). KTP merupakan salah satu dokumen penting yang harus dimiliki oleh setiap penduduk yang berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah. Dengan KTP seseorang dapat melakukan berbagai urusan administrasi yang berhubungan dengan dinas/instansi pemerintah misalnya mengurus perizinan dan surat-surat penting lainnya.

SIAK dilaksanakan di semua wilayah Kota Cirebon tidak terkecuali di Kecamatan Kesambi dalam pembuatan KTP, berdasarkan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 58 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Cirebon, kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh seorang Camat, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, mempunyai satu seksi yang ada di bawah Camat adalah Seksi Pelayanan Umum yang tugas-tugasnya berhubungan dengan pelayanan umum

diantaranya dalam pembuatan KTP. Melalui implementasi SIAK diharapkan pembuatan KTP di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon dapat dilakukan secara efektif. Kecamatan Kesambi Kota Cirebon memiliki 5 (lima) kelurahan dengan jumlah penduduk seluruhnya 69.048 jiwa. Dari keseluruhan jumlah penduduk Kecamatan Kesambi Kota Cirebon tersebut penduduk yang wajib memiliki KTP adalah sebanyak 45.455 jiwa atau 65,83 %.

Berdasarkan pengamatan/penelitian pendahuluan, terlihat bahwa pembuatan KTP di Kecamatan Kesambi belum efektif seperti yang diharapkan, hal ini dapat dilihat dari indikator sebagai berikut :

1. Belum semua wajib KTP memiliki KTP, ini terlihat dari jumlah penduduk Kecamatan Kesambi sejumlah 69.048 jiwa dan yang sudah wajib memiliki KTP sejumlah 45.455 jiwa dari jumlah penduduk yang sudah wajib memiliki KTP terdapat penduduk wajib KTP yang belum memiliki KTP sebanyak 8.540 jiwa atau 18,78 %. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk yang sudah memiliki KTP baru mencapai 36.915 atau 81,22 %.
2. Waktu penyelesaian pembuatan KTP sejak kebijakan SIAK diterapkan justru bertambah lama antara 2 minggu sampai dengan 1 bulan baru selesai, sedangkan sebelum kebijakan SIAK paling lama 1 minggu. Menurut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kota Cirebon bahwa pembuatan KTP tidak dipungut biaya, tetapi pada kenyataannya apabila membayar sejumlah rupiah, maka dapat cepat selesai, satu atau dua hari selesai.
3. Kualitas KTP sejak kebijakan SIAK diterapkan tidak lebih baik dari sebelum kebijakan SIAK diterapkan yaitu dari laminating cetakkan sekarang laminating biasa.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pernyataan masalah (*problem statement*) yaitu : Efektivitas pembuatan KTP di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon tidak tercapai, hal ini diduga berkaitan erat dengan faktor-faktor : komunikasi, sumber-sumber, disposisi dan struktur birokrasi dalam kebijakan SIAK yang tidak optimal.

Identifikasi Masalah

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan masalah (*problem questions*) sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh komunikasi terhadap efektivitas pembuatan KTP di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon ?
2. Seberapa besar pengaruh sumber daya terhadap efektivitas pembuatan KTP di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon ?
3. Seberapa besar pengaruh disposisi terhadap efektivitas pembuatan KTP di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon ?
4. Seberapa besar pengaruh struktur birokrasi terhadap efektivitas pembuatan KTP di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon ?
5. Seberapa besar pengaruh komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dalam kebijakan SIAK terhadap efektivitas pembuatan KTP di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon ?

Tujuan penelitian

Sesuai indentifikasi masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Menganalisis pengaruh X (komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi) terhadap Y (efektivitas pembuatan KTP) di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon ?

2. Mengembangkan konsep X (komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi) terhadap Y (efektivitas pembuatan KTP) di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon ?
3. Menerapkan konsep X (komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi) secara teoritis dalam memecahkan masalah Y (efektivitas pembuatan KTP) di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon ?

Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis, yaitu :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan konsep-konsep dan teori-teori ilmu administrasi publik, khususnya kajian implementasi kebijakan publik, dalam hal ini implementasi kebijakan SIAK.
2. Kegunaan praktis yaitu diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan kepada Kantor Kecamatan Kesambi, Kantor Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Kesambi Kota Cirebon agar dapat lebih menyempurnakan implementasi kebijakan SIAK dalam rangka meningkatkan efektivitas pembuatan KTP.

Pengertian Implementasi

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah:

Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)¹

Oleh karena itu implementasi kebijakan dalam pembuatannya melalui adanya suatu tahapan, tahapan tersebut dalam pelaksanaannya di pengaruhi oleh masyarakat karena dengan melibatkan masyarakat maka pelaksanaan kebijakan akan berhasil. Akan tetapi walaupun kebijakan tersebut sudah tepat dan mengikutsertakan masyarakat maka akan mengalami kegagalan yang diakibatkan oleh kurang diimplementasikan oleh para pelaksana kebijakan. Oleh karena itu apabila suatu kebijakan dapat berhasil maka dalam prosesnya harus melibatkan masyarakat dan juga dalam mengimplementasikan kebijakan harus maksimal sehingga diperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengertian implementasi di atas Van Meter dan Van Horn menjelaskan hal-hal yang dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu implementasi yang dikutip oleh Wahab, yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber-sumber kebijakan
3. Ciri-ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
5. Sikap para pelaksana, dan
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik²

Pertama, ukuran dan tujuan kebijakan dibutuhkan agar dapat memberikan arah dalam melaksanakan kebijakan, hal tersebut agar apa yang dilaksanakan sesuai dengan program yang telah direncanakan. Dalam tolak ukur kebijakan SIAK yang dijadikan sasaran adalah apa yang dirasakan oleh masyarakat kepuasan pelayanan dan kemudahan dalam pembuatan

¹ Webster dalam Wahab, 2005:64

² Meter dan Horn dalam Wahab, 2005:79.

KTP, KK dan Akta Catatan Sipil. Tujuan dari kebijakan SIAK, yaitu membangun *data base* kependudukan melalui pemberlakuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bersifat nasional berguna dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Tujuan selanjutnya sebagai alat perlindungan, yaitu Memberikan perlindungan terhadap penduduk, dengan memberikan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan (KTP, KK dan Akta Catatan Sipil berbasis NIK). Kebijakan diimplementasikan harus secara jelas sesuai dengan tujuannya, kebijakan apa yang akan ditetapkan sebagai sistem yang akan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi.

Kedua, menurut Van Metter dan Van Horn yang dikutip oleh Agustino, “sumber daya kebijakan merupakan keberhasilan proses implementasi kebijakan yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu”³. Sumber-sumber kebijakan itu sangat dibutuhkan untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sumber daya manusia merupakan motor penggerak dan pelaksana kebijakan, anggaran dibutuhkan untuk kelancaran pembiayaan kebijakan agar tidak menjadi penghambat proses kebijakan. Sedangkan waktu adalah bagian terpenting dalam pelaksanaan kebijakan, karena waktu merupakan pendukung keberhasilan kebijakan. Sumber daya waktu merupakan salah satu penentu pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan.

Ketiga, berhasil atau tidaknya kebijakan dapat dilihat dari sifat atau ciri-ciri badan/instansi pelaksana kebijakan. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para badan atau instansi pelaksananya. Menurut Subarsono “kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor, kualitas tersebut adalah tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya”⁴. Selanjutnya menurut Edwards III yang dikutip oleh Subarsono “watak, karakteristik atau ciri-ciri yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis”⁵. Hal penting karena kinerja implementasi sangat dipengaruhi oleh sifat ataupun ciri-ciri dari pelaksana tersebut. Apabila pelaksana memiliki sifat atau karakteristik yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan demikian pula sebaliknya.

Keempat, komunikasi merupakan faktor dominan dalam melakukan koordinasi implementasi kebijakan. Menurut Hogwood dan Gunn yang dikutip oleh Wahab bahwa “koordinasi bukanlah sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik pelaksanaan kebijakan”⁶. Selanjutnya Edward III yang dikutip oleh Widodo, “komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi antara lain: dimensi transformasi atau penyampaian informasi kebijakan publik, kejelasan, dan konsistensi”⁷. Apabila koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi baik, maka memperkecil suatu kesalahan begitu pula sebaliknya.

Kelima, menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Subarsono, bahwa “karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi”⁸. Sikap dan perilaku para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pelaksana kebijakan harus dilandasi dengan sikap yang kuat, tegas dan disiplin. Hal tersebut dilakukan karena akan berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan, setiap badan/instansi pelaksana kebijakan

³ Meter dan Horn dalam Agustino, (2007:142)

⁴ Subarsono, (2010:7)

⁵ Edwards III dalam Subarsono, (2010:91-92)

⁶ Hogwood dan Gunn dalam Wahab, (2005:77)

⁷ Edward III dalam Widodo, (2007:97).

⁸ Meter dan Horn dalam Subarsono, (2010:101).

harus merasa memiliki terhadap tugasnya masing-masing berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Keenam, dalam menilai kinerja keberhasilan implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Agustino adalah “sejauh mana lingkungan eksternal ikut mendukung keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan, lingkungan eksternal tersebut adalah ekonomi, sosial, dan politik”⁹. Menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Subarsono, “dukungan sumber daya ekonomi dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan dan dalam lingkungan politik dukungan elite politik sangat diperlukan dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan”¹⁰. Sedangkan dalam pandangan Edwards III yang dikutip oleh Widodo, “implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: 1) komunikasi, 2) sumberdaya, 3) disposisi, dan 4) struktur birokrasi”¹¹.

Berdasarkan keempat variabel di atas, lebih jelas akan diuraikan sebagai berikut:

Komunikasi implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui dan mengerti apa yang harus dilakukan, sehingga apabila membuat kebijakan tidak salah. Disamping itu dalam komunikasi implementasi kebijakan ada tujuan dan sasaran kebijakan yang harus diinformasikan kepada kelompok sasaran, hal tersebut dilakukan agar untuk memperkecil kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan.

Sumberdaya, walaupun maksud dan tujuan kebijakan sudah diinformasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi apabila pelaksana/implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan maka akan berjalan tidak efektif. Sumberdaya yang dapat memberi dukungan dalam pelaksanaan kebijakan agar dapat berwujud, seperti sumberdaya manusia, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan, tanpa sumberdaya kebijakan tidak akan berjalan dengan baik.

Disposisi, adalah karakteristik yang harus dimiliki oleh setiap pelaksana kebijakan, disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran dan tujuan serta keinginan pembuat kebijakan.

Struktur organisasi, bertugas melaksanakan kebijakan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan. Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya pedoman bagi pelaksana kebijakan dalam bertindak atau menjalankan tugasnya seperti SOP (*standard operating procedures*).

Beberapa Pengertian Efektivitas

Implementasi kebijakan dikatakan berhasil apabila sasaran atau tujuan dari kebijakan itu dapat dicapai yang dinyatakan dengan istilah efektivitas. Secara umum, efektivitas merupakan kriteria untuk mengukur sampai sejauh mana pencapaian sasaran dan tujuan. Hal ini sesuai dengan pendapat Emerson dalam Handyaningrat yang mengartikan “efektivitas sebagai pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya” selanjutnya menegaskan pula bahwa “bila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya adalah efektif. Jadi kalau tujuan atau sasaran itu tidak selesai dengan waktu yang telah ditentukan, pekerjaan itu tidak efektif”¹².

Memperhatikan pendapat Emerson tersebut di atas, maka efektivitas meliputi dua kriteria yaitu

1. Pencapaian sasaran dan tujuan
2. Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan

⁹ Meter dan Horn dalam Agustino, (2007:144)

¹⁰ Meter dan Horn dalam Subarsono, (2010:99)

¹¹ Edwards III dalam Widodo, (2007:96-110)

¹² Emerson dalam Handyaningrat (1996 : 16)

Siagian memberikan pengertian efektivitas yaitu : “Kalau seseorang berbicara tentang efektivitas sebagai orientasi kerja, berarti yang menjadi sorotan perhatiannya adalah tercapainya berbagai sasaran yang telah ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah dialokasikan untuk melakukan berbagai kegiatan tersebut”¹³.

Soedjadi mengemukakan bahwa efektivitas mempunyai arti : “kegiatan telah dilaksanakan dengan tepat, dalam arti target tercapai sesuai dengan waktu yang ditetapkan, tetapi target-target itu harus dikaitkan dengan mutunya”¹⁴.

Jika melihat pendapat-pendapat tersebut di atas efektivitas meliputi tiga kriteria yaitu :

1. Pencapaian target
2. Ketepatan waktu
3. Kualitas (mutu) hasil kegiatan

Kerangka Pemikiran

Penggunaan alat pengolahan data secara elektronik yang dalam kenyataan dan praktiknya adalah pengolahan data dengan menggunakan jaringan komputer dan semua sarana pendukungnya. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan adanya jaringan komputerisasi menjadi lebih cepat dan tentunya dapat menghemat pengeluaran biaya. Hal tersebut terjadi karena tidak membutuhkan banyak tenaga manusia lagi melainkan yang dibutuhkan adalah manusia yang mempunyai keahlian dalam mengoperasikan jaringan komputerisasi. Selain itu dengan adanya pelayanan prima, tertib administrasi dapat terkendali dikarenakan dengan adanya sarana-prasarana modern seperti adanya jaringan komputerisasi. Penggunaan alat pengolahan data kependudukan secara elektronik melalui SIAK adalah merupakan kebijakan negara/publik yang bertujuan agar pelayanan administrasi kependudukan lebih cepat, tepat dan murah.

Dalam Ilmu Administrasi Publik terdapat tiga dimensi prima yaitu “*Public Policy* (Kebijakan Publik), *Perilaku Organisasi*, dan *Pembinaan Organisasi*”¹⁵. Yang berarti bahwa kebijakan publik merupakan salah satu dimensi prima dan salah satu konsep penting dalam administrasi publik.

Dye dalam mengemukakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan”¹⁶. Sedangkan Dunn mengemukakan bahwa : “Kebijakan publik pada hakikatnya berupa pilihan tindakan-tindakan pemerintah yang dialokasikan kepada seluruh masyarakat, sehingga kebijakan tersebut bersifat mengikat, mempunyai tujuan-tujuan tertentu dan selalu diorientasikan terhadap kepentingan publik”¹⁷.

Islamy mengemukakan tentang pengertian kebijakan publik (kebijaksanaan negara) adalah :

Kebijaksanaan negara adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka ada tujuannya dan kebijaksanaan negara itu harus meliputi semua tindakan pemerintah. Jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Disamping itu, sesuatu yang tidak dilaksanakan pemerintah pun termasuk kebijaksanaan negara. Hal ini disebabkan karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.¹⁸

¹³ Siagian (1998 : 157)

¹⁴ Soedjadi (1999 : 37)

¹⁵ Thoha, (2003 : 53)

¹⁶ Dye dalam Thoha (2003 : 62)

¹⁷ Dunn (2000 : 36)

¹⁸ Islamy (2001 : 18)

Anderson dalam Suharto mengemukakan bahwa “Kebijakan publik adalah kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan aparat pemerintah.”¹⁹ Sedangkan Peterson dalam Nugroho menyatakan bahwa “Kebijakan publik adalah tindakan pemerintah yang ditujukan kepada beberapa masalah.”²⁰

Salah satu kebijakan publik di Indonesia adalah yang mengatur tentang administrasi kependudukan sebagaimana dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam Undang-Undang tersebut antara lain mengatur tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). SIAK adalah suatu sistem informasi yang berlaku secara nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan administrasi kependudukan di setiap tingkatan wilayah administrasi pemerintahan.

Jika dikaitkan dengan teori administrasi dan manajemen, sistem informasi merupakan sarana penting yang harus tersedia dalam pengambilan keputusan secara efektif. Hal ini berarti dengan adanya sistem informasi yang tersusun secara sistematis, maka pemimpin memperoleh gambaran tentang suatu masalah yang akan diputuskannya. Berkenaan dengan hal tersebut, Siagian mengemukakan: “Agar bermanfaat sebagai penunjang kegiatan organisasi, informasi yang dimiliki perlu diinterpretasikan dengan tepat. Salah satu faktor penentu pemanfaatan informasi ialah kaitan informasi yang dimiliki dengan proses pengambilan keputusan.”²¹

SIAK sebagai salah satu kebijakan publik, sudah tentu telah melalui serangkaian proses, mulai penetapan, pelaksanaan (implementasi), sampai dengan evaluasi. Anderson dalam Subarsono mengatakan bahwa kebijakan publik terdiri dari lima proses yaitu

- 1) Formulasi masalah (*problem formulation*)
- 2) Formulasi kebijakan (*policy formulation*)
- 3) Penentuan kebijakan (*adoption*)
- 4) Implementasi (*implementation*)
- 5) Evaluasi (*evaluation*)²²

Mengacu pada pendapat para ahli di atas, maka salah satu kebijakan publik adalah implementasi kebijakan publik. Istilah “implementasi” berasal dari bahasa Inggris yakni “*implementation*” yang berarti pelaksanaan. Istilah ini selalu berkonotasi sebagai kegiatan *activity*, bahkan kedua istilah ini sering digunakan dalam suatu konteks pengertian yakni *impementation activity*.

Oleh sebab itu sesuatu yang dilakukan mengakibatkan pengaruh atau akibat dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Sementara itu pengertian implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo yaitu :

“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”²³

Dari pengertian di atas, bahwa implementasi tidak hanya melibatkan badan eksekutif yang bertanggung jawab dalam melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan pada diri kelompok sasaran, hal ini tidak bisa terlepas dengan kekuatan politik, ekonomi dan sosial

¹⁹ Anderson dalam Suharto (2005 : 44)

²⁰ Peterson dalam Nugroho (2006 : 23)

²¹ Siagian (2003 : 11)

²² Anderson dalam Subarsono (2005 : 12)

²³ Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo, (2001:192)

yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berdampak baik seperti apa yang harapan ataupun tidak seperti yang harapan.

Memperhatikan pengertian implementasi di atas Edward III mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi adalah “1) komunikasi, 2) sumber-sumber, 3) disposisi, dan 4) struktur birokrasi.”²⁴

Berdasarkan pengertian Implementasi menurut Edward III di atas, bahwa suatu implementasi dipengaruhi oleh komunikasi, sumber-sumber, disposisi (sikap para pelaksana) dan struktur birokrasi merupakan suatu yang saling mempengaruhi dan saling berkaitan.

Pertama, komunikasi suatu yang dominan bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Selanjutnya Hogwood dan Gunn yang dikutip oleh Wahab bahwa “koordinasi bukanlah sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik pelaksanaan kebijakan”²⁵.

Menurut Edward III yang dikutip oleh Widodo, “komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi antara lain: dimensi transformasi atau penyampaian informasi kebijakan publik, kejelasan, dan konsistensi”²⁶. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak terkait dalam suatu proses implementasi kebijakan, maka akan memperkecil terjadinya kesalahan begitu pula sebaliknya.

Kedua, Edward III menjelaskan seperti yang dikutip oleh Widodo, mengemukakan “beberapa macam sumber-sumber antara lain: Sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, dan sumber daya informasi dan kewenangan”²⁷.

Sumberdaya manusia sangat penting karena sebagai sumber penggerak dan pelaksana kebijakan, sumberdaya keuangan diperlukan untuk kelancaran pembiayaan kebijakan agar tidak menghambat proses implementasi kebijakan, sumberdaya peralatan sangat penting karena dapat menunjang proses implementasi. Jika peralatan dalam proses implementasi tidak memadai, maka implementasi SIAK tidak dapat terlaksana dengan baik. Sedangkan sumberdaya informasi dan kewenangan, informasi suatu yang mutlak harus diketahui para pelaksana agar melaksanakan proses implementasi, sedangkan kewenangan harus dimiliki oleh para pelaksana kebijakan agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan tujuan SIAK yaitu

1. Peningkatan kualitas pelayanan penduduk dan catatan sipil;
2. Penyediaan data untuk perencanaan pembangunan dan pemerintahan; dan
3. Penyelenggaraan pertukaran data secara tersistem dalam verifikasi data individu dalam pelayanan publik.

Sedangkan secara teknis implementasi SIAK memiliki tujuan agar :

1. Database Kependudukan terpusat melalui pemberlakuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan.
2. Database Kependudukan dapat diintegrasikan untuk kepentingan lain (Statistik, Pajak, Imigrasi, dll).
3. Sistem SIAK terintegrasi (RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Pendaftaran Penduduk, Catatan Sipil, dll).
4. Adanya Standar Nasional Administrasi Kependudukan.
5. Memberikan perlindungan terhadap penduduk, dengan memberikan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan (KK, KTP dan Akta-Akta Catatan Sipil) dengan mencantumkan NIK Nasional.

²⁴ Edward III dalam Widodo (2007 : 96 – 110)

²⁵ Hogwood dan Gunn dalam Wahab, (2005 : 77)

²⁶ Edward III dalam Widodo, (2007 : 97)

²⁷ Edward III dalam Widodo (2007 : 98 - 102)

Ketiga, selanjutnya Edward III mengemukakan seperti yang dikutip oleh Widodo mengatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh:

“Keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan (implementors) mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan dari para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang di implementasikan”²⁸.

Van Horn dan Van Meter definisinya seperti yang dikutip oleh Widodo, terdapat tiga macam elemen respon yang mempengaruhi keinginan para pelaksana dalam melaksanakan suatu kebijakan, antara lain : “Pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan”²⁹. Disposisi sangat diperlukan karena apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan.

Keempat, Edward III menjelaskan seperti yang dikutip oleh Widodo, mengemukakan bahwa “struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) mencakup dimensi fragmentasi (*fragmentation*) dan standar prosedur operasi (*standar operating procedure*) yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya”³⁰.

Implementasi kebijakan dikatakan berhasil apabila sasaran atau tujuan kebijakan itu dapat dicapai yang dinyatakan dengan istilah efektivitas. Secara umum, efektivitas merupakan kriteria untuk mengukur sampai sejauh mana pencapaian sasaran dan tujuan. Hal ini sesuai dengan pendapat Emerson dalam Handyaningrat yang memeberikan arti efektivitas sebagai “pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa “bila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya adalah efektif.”³¹ Memperhatikan pendapat Emerson di atas, maka efektivitas meliputi dua kriteria yaitu pencapaian sasaran dan tujuan serta ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan.

Pengertian efektivitas juga dikemukakan oleh Soedjadi yaitu “kegiatan telah dilaksanakan dengan tepat, dalam arti target tercapai sesuai dengan waktu yang ditetapkan, tetapi target-target itu harus dikaitkan dengan mutunya.”³² Yang berarti efektivitas meliputi tiga kriteria yaitu

- 1) Pencapaian target
- 2) Ketepatan waktu
- 3) Kualitas (mutu) hasil kegiatan

Efektivitas suatu hasil dapat diperoleh apabila implementasi kebijakan dilakukan dengan tepat. Hal ini sesuai dengan pendapat Abidin bahwa “Efektivitas (*effectiveness*) mengukur apakah sesuatu alternatif sasaran yang dicapai dengan suatu alternatif kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir (*outcomes = effect*) yang dikehendaki”³³. Dengan demikian, implementasi kebijakan mempengaruhi efektivitas sasaran yang dicapai oleh kebijakan tersebut.

Memperhatikan uraian di atas, penulis mengemukakan kerangka pemikiran sebagai berikut :

Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) merupakan suatu kebijakan publik karena :

1. Kebijakan SIAK ditetapkan oleh pemerintah dalam bentuk Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

²⁸ Edward III dalam Widodo, (2007:104)

²⁹ Van Horn dan Van Meter dalam Widodo (2007 : 105)

³⁰ Edward III dalam Widodo (2007 : 106)

³¹ Emerson dalam Handyaningrat (1996 : 16)

³² Soedjadi (1999 : 37)

³³ Abidin (2005 : 57)

2. Kebijakan SIAK berupa pilihan tindakan-tindakan pemerintah yang dialokasikan kepada seluruh masyarakat, sehingga kebijakan tersebut bersifat mengikat, mempunyai tujuan-tujuan tertentu dan selalu diorientasikan terhadap terpenuhinya kepentingan publik, dalam hal ini pelayanan administrasi kependudukan berupa pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

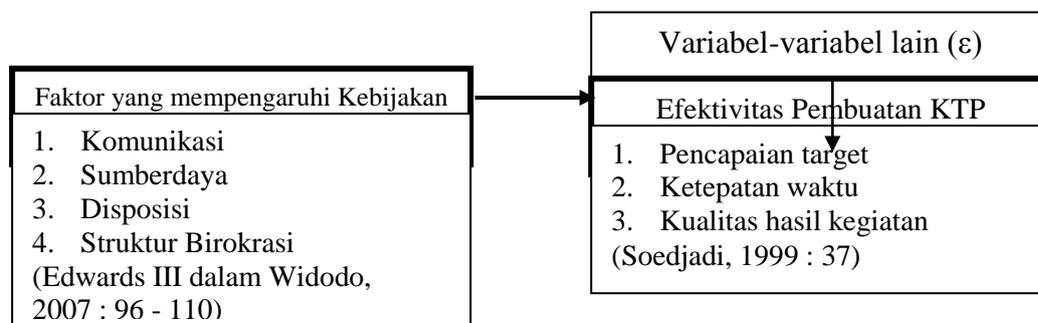
Salah satu tujuan kebijakan SIAK menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah “terpenuhinya hak penduduk di bidang administrasi kependudukan dengan pelayanan yang profesional”. Salah satu pelayanan yang dimaksud adalah pembuatan KTP yang wajib dimiliki oleh setiap penduduk usia 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah.

Kebijakan publik berupa SIAK itu harus diimplementasikan karena suatu kebijakan publik tidak akan bermanfaat apabila tidak diimplementasikan secara konkrit di lapangan. Implementasi kebijakan SIAK adalah sesuatu yang penting karena kebijakan SIAK hanya akan berupa impian atau rencana yang bagus yang tersimpan rapih dalam arsip apabila tidak diimplementasikan.

Dalam implementasi kebijakan SIAK harus diperhatikan beberapa faktor yang akan menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasinya. Faktor-faktor tersebut menurut Edwards III dalam Widodo, “meliputi komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi”.³⁴

Keempat faktor tersebut harus benar-benar dipenuhi dan diperhatikan dalam implementasi kebijakan SIAK sehingga pembuatan KTP dapat dilakukan secara efektif. Efektivitas menurut Soedjadi yaitu “tercapainya target, ketepatan waktu, dan kualitas hasil kerja”³⁵

Berdasarkan pada pendapat para ahli di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam bentuk paradigma pemikiran penelitian secara sederhana seperti berikut



Letak dan Kondisi Geografis

Kantor Kecamatan Kesambi Kota Cirebon berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB) A berdiri di atas tanah milik Pemerintah Kota Cirebon dengan luas 1.030 M² dengan status Hak Pakai Nomor 31 tanggal 28 Juli 1992 terletak di Jl. Dr. Sudarsono Nomor 12 Kota Cirebon.

Luas wilayah Kecamatan Kesambi Kota Cirebon ± 805.870 hektar (Ha) yang terbagi menjagi 42 % wilayah pemukiman, 21 % sarana pendidikan, olahraga dan pariwisata serta 37 % tanah kosong. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Kesambi Kota Cirebon :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon
2. Sebekah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon

³⁴ Edwards III dalam Widodo, (2007 : 96 - 110)

³⁵ Soedjadi (1999 : 37)

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Cirebon

Wilayah Kecamatan Kesambi Kota Cirebon terdiri dari 5 Kelurahan dan 55 Rukun Warga.

4.2.1.1. Pengaruh Faktor Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan SIAK Terhadap Efektivitas Pembuatan KTP di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon

Suatu kebijakan sebelum diimplementasikan harus dikomunikasikan terlebih dahulu kepada semua pihak yang akan melaksanakan kebijakan dan yang akan dijadikan objek daripada kebijakan tersebut. Begitu pula halnya kebijakan SIAK sebelum diimplementasikan harus dilakukan sosialisasi kepada aparat pelaksana dan masyarakat sebagai objek kebijakan secara jelas dan intensif, sosialisasi dilakukan dengan cara penyuluhan kepada masyarakat oleh aparat dengan jelas dan intensif agar aparat dan masyarakat benar-benar memahami hak dan kewajibannya dalam kebijakan SIAK.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan SIAK khususnya dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon menunjukkan belum efektif dengan persentase 58,42 %. Dengan demikian pembuatan KTP juga belum dilaksanakan secara efektif, sehingga faktor komunikasi berpengaruh terhadap efektivitas pembuatan KTP di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon

4.2.1.2. Pengaruh Faktor Sumberdaya Dalam Implementasi Kebijakan SIAK Terhadap Efektivitas Pembuatan KTP di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan sumberdaya memegang peranan penting dan menentukan keberhasilan kebijakan tersebut, oleh karena itu dalam mengimplementasikan kebijakan harus didukung oleh aparat yang memadai, kualifikasi (mutu) aparat, sarana dan prasarana yang memadai begitupula dengan dukungan dana operasional yang disediakan memadai. Tidak terkecuali dalam mengimplementasikan kebijakan SIAK didukung oleh aparat yang mempunyai kompetensi, sarana dan prasarana serta dana operasionalnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor sumberdaya dalam implementasi kebijakan SIAK khususnya dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon menunjukkan belum efektif dengan persentase 59,58 %. Dengan demikian pembuatan KTP belum dilaksanakan secara efektif, sehingga faktor sumberdaya berpengaruh terhadap efektivitas pembuatan KTP di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon

4.2.1.3. Pengaruh Faktor Disposisi Dalam Implementasi Kebijakan SIAK Terhadap Efektivitas Pembuatan KTP di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon

Suatu kebijakan akan berhasil dengan baik dalam implementasinya apabila didukung oleh aparat pelaksana, perilaku aparat pelaksana yang positif dan sesuai dengan prosedur dalam mengimplementasikan kebijakan, penempatan/ penyusunan aparat pelaksana dilakukan berdasarkan prinsip *the right man in the right place* dan motivasi aparat pelaksana dalam bekerja sangat tinggi serta sikap masyarakat. Demikian pula dengan kebijakan SIAK akan berhasil dengan baik dalam implementasinya jika didukung oleh aparat pelaksana, perilaku aparat pelaksana yang positif dan sesuai dengan prosedur dalam mengimplementasikan kebijakan, penempatan/ penyusunan aparat pelaksana dilakukan berdasarkan prinsip *the right man in the right place* dan motivasi aparat pelaksana dalam bekerja sangat tinggi serta sikap masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor disposisi dalam implementasi kebijakan SIAK khususnya dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon menunjukkan belum efektif dan perlu ditingkatkan dengan persentase 58,91 %.

Dengan demikian pembuatan KTP belum dilaksanakan secara efektif, sehingga faktor disposisi berpengaruh terhadap efektivitas pembuatan KTP di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon

4.2.1.4. Pengaruh Faktor Struktur Birokrasi Dalam Implementasi Kebijakan SIAK Terhadap Efektivitas Pembuatan KTP di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan memegang peranan yang sangat penting, karena berkaitan dengan prosedur, sistem kerja, pembagian kerja, wewenang dan koordinasi antar instansi. Tidak bedanya dengan implementasi kebijakan SIAK khususnya dalam pembuatan KTP harus sesuai dengan prosedur, dengan sistem kerja yang baik, pembagian kerja, wewenang dan koordinasi antar instansi harus dilakukan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Memperhatikan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor struktur birokrasi dalam kebijakan SIAK khusus dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon menunjukkan belum efektif dengan persentase 59,14 %.

Dengan demikian pembuatan KTP belum dilaksanakan secara efektif, sehingga faktor struktur birokrasi berpengaruh terhadap efektivitas pembuatan KTP di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon

4.2.1.5. Pengaruh Faktor Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi Dalam Implementasi Kebijakan SIAK Terhadap Efektivitas Pembuatan KTP di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon

Dalam implementasi kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) khususnya dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) banyak sekali celah yang dapat menimbulkan berbagai. Untuk melihat berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan SIAK khususnya dalam pembuatan KTP dalam penelitian ini dapat dilihat dari faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Efektivitas pembuatan KTP jika hanya dilaksanakan dengan faktor komunikasi saja, maka pengaruh faktor komunikasi terhadap efektivitas pembuatan KTP hanya sebesar 17,89 %. Jika dalam upaya mencapai efektivitas pembuatan KTP hanya dilaksanakan faktor sumberdaya saja, maka pengaruh sumberdaya terhadap efektivitas pembuatan KTP sebesar 17,80 %. Jika dalam upaya meningkatkan efektivitas pembuatan KTP hanya dilaksanakan faktor disposisi, maka pengaruh disposisi terhadap efektivitas pembuatan KTP hanya sebesar 14,32 %. Jika dalam upaya mencapai efektivitas pembuatan KTP hanya dilaksanakan faktor struktur birokrasi, maka pengaruh struktur birokrasi terhadap efektivitas pembuatan KTP hanya sebesar 9,99 %.

Muncul pertanyaan, bagaimana apabila faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi tersebut dilaksanakan bersama-sama dalam upaya mencapai efektivitas pembuatan KTP di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas dan kontribusi yang saling mendukung antara faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi terhadap efektivitas pembuatan KTP di Kecamatan Kesambi. Jika faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi dilaksanakan secara bersama-sama, maka pengaruh bersama-sama dari keempatnya jauh lebih besar yaitu 60 %.

Terlihat dengan jelas bahwa pengaruh bersama-sama dari faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi lebih besar daripada pengaruh secara sendiri-sendiri seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Hal ini dapat dipahami, bahwa sesuatu hal yang dilakukan secara bersama-sama akan memberikan sinergi dan kontribusi yang lebih besar daripada yang dilakukan dengan sendiri-sendiri.

Jika kita bandingkan diantara keempat faktor tersebut menunjukkan bahwa faktor komunikasi (17,89 %) lebih besar daripada faktor sumberdaya (17,80 %), faktor disposisi (14,31 %) dan faktor struktur birokrasi (9,99 %). Dengan memperhatikan uraian tersebut, maka efektivitas pembuatan KTP di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon banyak dipengaruhi oleh faktor komunikasi dan faktor sumberdaya. Hal ini dapat dimengerti karena dalam implementasi kebijakan SIAK khususnya dalam pembuatan KTP di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon memerlukan komunikasi yang didalamnya termasuk sosialisasi, penyuluhan, dan lain sebagainya yang dilakukan aparat pelaksana kepada masyarakat dengan jelas dan intensif serta sumberdaya yang didalamnya termasuk jumlah aparat, mutu aparat, sarana, prasarana dan dukungan dana, sehingga pembuatan KTP dapat terlaksana secara efektif.

Adanya pengaruh faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi secara bersama-sama yang lebih besar dari variabel lain yang menunjukkan bahwa efektivitas pembuatan KTP di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon lebih banyak dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi daripada faktor-faktor lain. Maka dengan demikian hipotesis yang penulis ajukan teruji dan dapat diterima.

Meskipun efektivitas pembuatan KTP di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon lebih banyak dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi, tetapi ada faktor lain yang mempengaruhinya yaitu sebesar 40 %. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu adanya penelitian lanjutan yang meneliti faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap efektivitas pembuatan KTP di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.

4.2.2. Interpretasi Secara Simultan Pengaruh Faktor Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi Dalam Implementasi Kebijakan SIAK Terhadap Efektivitas Pembuatan KTP di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi Camat Kesambi Kota Cirebon telah memperlihatkan adanya pengaruh terhadap efektivitas pembuatan KTP. Dari pengaruh tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi berada pada tingkat belum efektif, yang artinya faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi memberikan pengaruh terhadap efektivitas pembuatan KTP di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.

Adapun besarnya pengaruh tersebut adalah 60 %. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian secara parsial faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi ada pengaruh terhadap efektivitas pembuatan KTP di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon. Keempat variabel tersebut menunjukkan pada kisaran cukup berpengaruh.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik simpulan yaitu :

1. Faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan SIAK berpengaruh besar terhadap efektivitas pembuatan KTP di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon. Pengaruhnya lebih besar daripada pengaruh variabel-variabel lain, sehingga efektivitas pembuatan KTP di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon lebih banyak dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan SIAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pembuatan KTP di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon. Hal ini berarti bahwa faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan SIAK memegang peranan penting dan menentukan efektivitas pembuatan KTP di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, sehingga makin efektif faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan SIAK, maka akan makin efektif pula

pembuatan KTP di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon. Adapun besarnya pengaruh faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan SIAK adalah sebesar 60 %. Hal ini berarti efektivitas pembuatan KTP di Kecamatan Kesambi dipengaruhi oleh variabel komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi daripada variabel lain yang hanya 40 %.

2. Efektivitas pembuatan KTP dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Besarnya pengaruh komunikasi terhadap efektivitas pembuatan KTP di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon adalah 17,89 %. Besarnya pengaruh sumberdaya terhadap efektivitas pembuatan KTP di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon sebesar 17,80 %. Besarnya pengaruh disposisi terhadap efektivitas pembuatan KTP di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon sebesar 14,32 %. Besarnya pengaruh struktur birokrasi terhadap efektivitas pembuatan KTP di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon sebesar 9,99 %. Dengan demikian, maka pengaruh simultan (bersama-sama) antara komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi terhadap efektivitas pembuatan KTP di Kecamatan Kesambi adalah 60 %.

Saran Praktis

1. Dalam upaya memperkaya dan pengembangan ilmu administrasi, perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui variabel apa saja yang dapat mempengaruhi efektivitas pembuatan KTP di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon diluar faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.
2. Pegawai yang bekerja di bagian pelayanan umum khususnya yang menangani pembuatan KTP diutamakan yang sudah berpengalaman, sehingga tidak terjadi gagal dalam memberikan pelayanan.
3. Kompetensi aparat pelaksana kebijakan SIAK harus ditingkatkan dengan lebih sering mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan kebijakan SIAK.
4. Sarana dan prasarana yang telah ada dalam mendukung kebijakan SIAK agar lebih ditingkatkan, baik jumlah maupun pemeliharaannya sehingga tidak cepat rusak untuk mencapai efektivitas pembuatan KTP yang lebih optimal.
5. Perilaku aparat pelaksana kebijakan SIAK agar dapat berperilaku positif sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam memberikan pelayanan khususnya dalam pembuatan KTP.
6. Bahwa faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi sangat berpengaruh terhadap efektivitas pembuatan KTP, maka disarankan agar pimpinan dapat mengetahui dan mengerti akan arti pentingnya faktor-faktor tersebut untuk memberikan motivasi kepada para aparat pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan SIAK sehingga berhasil dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abidin, Said Zaenal. 2005. Kebijakan Publik. Suara Bebas, Jakarta
- Al Rasjid, Harun. 1999. Analisis Jalur. Program Pascasarjana Unpad, Bandung.
- _____. 1999. Teknik Penarikan Sampel dan Pembuatan Skala. Program Pascasarjana Unpad, Bandung.
- _____. 1999. Statistik Sosial. Program Pascasarjana Unpad, Bandung.
- _____. 1999. Dasar-dasar Statistik Sosial. Program Pascasarjana Unpad, Bandung.
- Dunn, Willaim N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Edward III, George II C. 2007. Implementing Public Policy. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Handyaningrat, Soewarno. 1996. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Gunung Agung, Jakarta.
- Islamy, M Irfan. 2001. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Rineka Cipta, Jakarta.
- Nazir, Mohammad. 1999. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nugroho D, Riant. 2006. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Riduwan dan Kuncoro, Engkos Achmad. 2007. Cara Menggunakan dan Memaknai Analisis Jalur (Path Analysis). Alfabeta, Bandung.
- Siagian, Sondang P. 1998. Fungsi-Fungsi Manajerial. Rineka Cipta, Jakarta.
- _____. 2003. Sistem Informasi Manajemen. Bumi Aksara, Jakarta.
- Siegel, Sydney. 1994. Statistik Nonparametrik Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Gramedia, Jakarta.
- Sitepu, Nirwana K. 1994. Analisis Jalur (Path Analysis) Program Pascasarjana Unpad, Bandung.
- Soedjadi, F.X. 1999. O & M. Organization and Methods, Penunjang Berhasilnya Proses Manajemen. Haji Masagung, Jakarta.
- Subarsono. 2010. Analisis Kebijakan Publik. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2010 Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta, Bandung.
- _____. 2003. Statistik Untuk Penelitian. Alfabeta, Bandung.
- Suharto, Edi. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Alfabeta, Bandung.
- Surakhmad, Winarno. 1998. Pengantar Penelitian Ilmiah. Tarsito, Bandung.
- Syafiie, Inu Kencana, Tandjung, Djamaludin, Modeong, Supardan. 1999. Ilmu Administrasi Publik. Rineka Cipta, Jakarta.
- Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. APII dan Puslit KP2W Lemlit Unpad, Bandung.
- Thoha, Miftah. 2003. Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. Analisis Kebijaksanaan ; Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara, Jakarta.
- Westra, Pariata, dkk. (ed.). 1999. Ensiklopedia Administrasi. Haji Masagung, Jakarta.